MASALIQ
Jurnal Pendidikan dan Sains

e-ISSN: 2808-8115
p-ISSN: 2809-1051

Terindeks: Sinta 5, Copernicus, Dimensions, Scilit, Lens, Crossref, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/masaliq.v6i1.8279

IMPLEMENTASI PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DALAM MENJAGA KESESUAIAN DATA ADMINISTRASI: STUDI PADA BPK PERWAKILAN PROVINSI BALI

Implementation of State-Owned Asset Management in Maintaining Administrative Data Consistency: A Study at the BPK Representative Office of Bali Province

Ni Putu Herdina Divya Aristyarani & I Kadek Rian Prayana
Universitas Udayana
herdinadivya@gmail.com; rian.prayana@unud.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Nov 4, 2025	Nov 26, 2025	Dec 8, 2025	Dec 13, 2025

Abstract

The management of *Barang Milik Negara* (BMN) plays a crucial role in ensuring accountability and optimization of government assets; however, in practice, various challenges are still encountered, particularly regarding the accuracy of administrative data, the alignment between physical asset conditions and records, and the effectiveness of information system usage. This study aimed to examine the implementation of BMN management at BPK Perwakilan Provinsi Bali and to analyze the factors influencing the effectiveness of asset administration based on Edward III's policy implementation model, which comprises the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. A descriptive qualitative method was employed through interviews, observation, and document study involving officials responsible for BMN management. The findings show that BMN management has essentially followed established procedures, yet still faces obstacles such as limited human resources,

Masaliq Journal is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

suboptimal internal socialization, differing understandings of asset classification, and technical constraints in the SIMAN V2 application, including unstable internet connectivity and inefficient barcode scanning. These results underscore that the effectiveness of BMN management is strongly influenced by the quality of communication and coordination, improvement of managers' competencies, upgrading of technological infrastructure, and strengthened periodic physical verification of assets, all of which constitute critical prerequisites for achieving accountable and optimal state asset administration.

Keywords: State-Owned Asset Management; Policy Implementation; Edward III Model; Asset Information System; Effectiveness of Asset Administration

Abstrak: Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) memegang peranan penting dalam menjamin akuntabilitas dan optimalisasi aset pemerintah, namun dalam praktik masih dijumpai berbagai kendala terkait akurasi data administrasi, kesesuaian kondisi fisik aset, dan efektivitas penggunaan sistem informasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi pengelolaan BMN di BPK Perwakilan Provinsi Bali serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penatausahaan berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi terhadap pihak-pihak yang berwenang dalam pengelolaan BMN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan BMN pada dasarnya telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, namun masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kurang optimalnya sosialisasi internal, ketidaksepahaman klasifikasi aset, serta kendala teknis pada aplikasi SIMAN V2, termasuk jaringan internet yang tidak stabil dan pemindaian barcode yang kurang efisien. Temuan ini menegaskan bahwa efektivitas pengelolaan BMN sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan koordinasi, peningkatan kompetensi pengelola, pemutakhiran infrastruktur teknologi, serta penguatan verifikasi fisik aset secara berkala, yang secara keseluruhan menjadi prasyarat penting bagi terwujudnya penatausahaan aset negara yang akuntabel dan optimal.

Kata Kunci: Pengelolaan Barang Milik Negara; Implementasi Kebijakan; Model Edward III; Sistem Informasi Aset; Efektivitas Penatausahaan

PENDAHULUAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan komponen yang sangat penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. BMN, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mencakup seluruh barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN maupun sumber perolehan lainnya. Aset-aset tersebut tidak hanya bernilai ekonomis, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam menunjang tugas dan fungsi instansi pemerintah. Maka dari itu, pengelolaan BMN harus dilakukan secara tertib administrasi dan fisik agar dapat mencegah potensi kerugian negara. Ketidaktertiban dalam pengelolaan aset dapat memengaruhi akurasi laporan

keuangan pemerintah yang menjadi dasar pengambilan keputusan (Hartanto, 2018). Dengan demikian, pengelolaan BMN yang akuntabel dan transparan merupakan kebutuhan mendasar dalam sistem tata kelola pemerintahan modern.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara, termasuk BMN, dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sebagai lembaga pemeriksa eksternal yang memiliki kewenangan konstitusional berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E, BPK dituntut untuk memiliki ketertiban administrasi yang tinggi dalam mengelola asetnya sendiri. Ketertiban administrasi tersebut menjadi sangat penting mengingat akurasi data BMN berpengaruh langsung terhadap kewajaran laporan keuangan pemerintah. Menurut (Wicaksana & Nugroho, 2025), data administrasi yang akurat menunjukkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Apabila pengelolaan BMN di lingkungan BPK kurang optimal, maka akan menciptakan ketidaksesuaian antara fungsi pengawasan yang dijalankan dengan praktik internal yang seharusnya menjadi contoh bagi instansi lain sehingga itu, pengelolaan data administrasi BMN yang baik merupakan kebutuhan penting bagi BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Dalam rangka meningkatkan ketertiban administrasi BMN, pemerintah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), yang pada tahun 2023 bermigrasi dari versi desktop ke SIMAN V2 berbasis web. Perubahan sistem ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 yang mengatur penggunaan SIMAN V2 dalam pengelolaan aset negara. Migrasi sistem ini tidak hanya mengubah fitur aplikasi, tetapi juga mengubah pola penomoran aset, sehingga seluruh instansi pengguna termasuk BPK Perwakilan Provinsi Bali harus melakukan penyesuaian ulang. Dalam praktiknya, perubahan ini menimbulkan berbagai kendala teknis, seperti keharusan pencetakan ulang barcode, penginputan data baru, dan penyesuaian administrasi yang membutuhkan ketelitian tinggi. Selain itu, jaringan internet yang tidak stabil dan proses pemindaian barcode yang belum optimal turut menghambat akurasi penatausahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan teknologi membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur yang memadai (Handayani, 2023).

Permasalahan ketidaksesuaian data administrasi BMN memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas pengelolaan aset negara. Data yang tidak akurat berpotensi menimbulkan kesalahan pengambilan keputusan terkait pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Beberapa penelitian sebelumnya menyoroti pentingnya penguatan

pengendalian internal dan sistem informasi dalam pengelolaan BMN. Penelitian oleh (Fadirah et al., 2025), menemukan adanya kelemahan dalam validasi data aset dan menekankan perlunya integrasi sistem informasi manajemen aset. Sementara itu, studi (Majid, 2025), menunjukkan pentingnya inventarisasi fisik dan peningkatan kompetensi pengelola dalam memastikan akuntabilitas aset. Namun, kedua penelitian tersebut belum menyinggung persoalan migrasi SIMAN V2 dan dampaknya terhadap akurasi data administrasi. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk mengkaji aspek tersebut secara lebih mendalam.

Konteks inilah yang menjadikan penelitian mengenai implementasi pengelolaan BMN di BPK Perwakilan Provinsi Bali menjadi penting untuk dilakukan. Selain menghadapi perubahan sistem penatausahaan aset, BPK juga dituntut menjaga ketertiban administrasi sebagai lembaga yang menilai kewajaran laporan keuangan pemerintah. Analisis terhadap implementasi kebijakan pengelolaan BMN dapat dijelaskan melalui model George C. Edward III yang mencakup variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut sangat menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, terutama dalam memastikan konsistensi data administrasi dengan kondisi fisik aset. Penelitian ini bertujuan mengisi gap literatur terkait dampak migrasi SIMAN V2 terhadap kualitas penatausahaan BMN yang belum banyak dikaji. Dengan mengkaji kondisi di BPK Perwakilan Provinsi Bali, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan akurasi data, efektivitas pengelolaan aset, serta penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji implementasi pengelolaan BMN di BPK Perwakilan Provinsi Bali serta menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penatausahaan berdasarkan model implementasi kebijakan Edward III, meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam implementasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) dalam menjaga kesesuaian data administrasi di BPK Perwakilan Provinsi Bali. Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada kebutuhan untuk memahami fenomena secara komprehensif sesuai kondisi nyata di lapangan, terutama terkait proses pencatatan aset, kendala penatausahaan, serta dampak migrasi aplikasi SIMAN ke SIMAN V2 berbasis web sebagaimana dijelaskan (Abdussamad,

2021). Penelitian dilaksanakan pada BPK Perwakilan Provinsi Bali sebagai lokasi penelitian, dengan waktu pelaksanaan berada dalam periode kegiatan magang peneliti, yaitu pada 1 September sampai 10 Desember 2025. Sumber data utama diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah staf Subbagian Umum dan Teknologi Informasi yang bertanggung jawab terhadap pencatatan, penomoran, dan pemutakhiran data BMN. Wawancara dilakukan untuk menggali proses kerja, kendala administrasi, dan strategi penyelesaian masalah, sementara observasi digunakan untuk melihat praktik pengelolaan aset secara langsung, seperti verifikasi fisik, pemindaian barcode, serta proses penginputan data ke SIMAN V2. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi temuan melalui penelaahan dokumen resmi seperti daftar inventaris BMN, laporan penatausahaan, dan SOP pengelolaan aset.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data (Matthew B Miles, A Michael Huberman, 2020), yang meliputi tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring seluruh informasi hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memfokuskan data pada isu relevan seperti kesesuaian data administrasi, kendala migrasi SIMAN V2, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penatausahaan. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif yang terstruktur agar temuan dapat dibaca, dipahami, dan dianalisis secara sistematis, mencakup alur kerja pengelolaan BMN, hambatan teknis seperti instabilitas jaringan internet atau proses penomoran ulang aset, serta peran staf pengelola dalam menjaga ketertiban administrasi. Tahap terakhir yaitu penarikan kesimpulan dilakukan dengan menafsirkan temuan berdasarkan teori implementasi kebijakan Edward III sebagai pisau analisis utama meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Melalui tahapan analisis ini, penelitian mampu memberikan pemahaman mendalam mengenai efektivitas implementasi pengelolaan BMN di BPK Perwakilan Provinsi Bali serta faktor-faktor yang memengaruhi kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset di lapangan.

HASIL

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di BPK Perwakilan Provinsi Bali secara umum telah berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan wawancara dengan pengelola BMN, Bapak Bambang Triardana, proses pengelolaan telah mencakup pencatatan

awal, penomoran, pendistribusian, hingga penyusunan Daftar Barang Ruangan (DBR) pada setiap unit kerja. Beliau menyampaikan,

"Setiap barang yang datang pasti kami catat dulu dari SAKTI atau transfer masuk, lalu diberikan nomor dan dicatat di DBR, supaya semua bisa dilacak kalau diperlukan."

Proses ini menunjukkan bahwa mekanisme penatausahaan telah mengikuti standar pengelolaan aset, dan menjadi dasar penting dalam menjamin akurasi data administrasi BMN. Pencatatan fisik juga dilakukan melalui kegiatan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi barang, dan penghapusan sesuai dengan ketentuan PP No. 18 Tahun 2020.

Pelaksanaan pengelolaan BMN melibatkan beberapa pihak, yakni operator SIMAN dan SAKTI, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Kepala Satuan Kerja (Satker). Meskipun demikian, temuan lapangan menunjukkan adanya kendala sumber daya manusia. Beban kerja operator cukup tinggi karena harus menangani urusan BMN sekaligus tugas administratif lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa keterbatasan personel berpengaruh langsung pada keterlambatan pembaruan data. Minimnya SDM juga sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa beban kerja ganda dapat menurunkan ketelitian operator dalam proses penatausahaan aset. Dalam wawancara, Bapak Bambang menyampaikan,

"Kadang kami harus urus BMN sambil tangani pekerjaan lain, jadi waktunya terbagi, tidak bisa fokus di satu pekerjaan saja."



Gambar 1. SIMAN V2

Dari gambar 1 tersebut, dalam rangka mendukung tertib administrasi dan akurasi data pengelolaan aset, pemerintah telah mengembangkan beberapa sistem informasi, salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yang digunakan untuk mengelola BMN mulai dari perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan. Pada tahun 2023 dilakukan perpindahan dari aplikasi SIMAN yang berbasis desktop ke aplikasi SIMAN V2 yang berbasis web. Dasar hukum penggunaan SIMAN V2 adalah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara. Sistem ini berfungsi untuk memastikan bahwa setiap transaksi aset negara, mulai dari perolehan, penggunaan, pemanfaatan hingga pemusnahan, dapat terdokumentasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan pemerintah.



Gambar 2. Penomoran aset yang lama



Gambar 3. Penomoran aset yang baru

Dari gambar 2 dan 3 diatas menunjukkan adanya migrasi dari SIMAN berbasis dekstop ke SIMAN V2 ini, terjadi juga perubahan bentuk penomoran BMN sehingga menyebabkan seluruh aset harus diberi penomoran ulang. Hal tersebut berdampak pada munculnya berbagai kendala dalam praktik pelaksanaannya, termasuk di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Bali.

Ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi fisik aset menjadi temuan penting lainnya dalam penelitian ini. Salah satu penyebabnya adalah perbedaan persepsi antar operator terkait penyebutan dan klasifikasi jenis barang. Hal ini terungkap dari pernyataan Bapak Bambang, menyebutnya lemari kayu, tapi operator lain menulis buffet. Karena tidak ada peralihan yang jelas, akhirnya data di sistem kadang tidak sama dengan barang aslinya. Perbedaan istilah tersebut menyebabkan operator harus melakukan penelusuran ulang ketika mencocokkan data di SIMAN V2 dengan barang fisik di ruangan. Ketidakkonsistenan

klasifikasi ini menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan, yang berdampak pada ketidaksesuaian data administrasi dan efisiensi proses verifikasi fisik.

Untuk menjaga akurasi data, operator BMN melakukan pencocokan barang melalui verifikasi kode barang, ciri fisik, dan lokasi penyimpanan. Meskipun demikian, intensitas inventarisasi fisik yang hanya dilakukan lima tahun sekali dinilai tidak memadai untuk mengikuti dinamika perubahan kondisi barang. Bapak Bambang menjelaskan,

"Kalau nunggu inventarisasi lima tahunan, kadang sudah banyak perubahan. Idealnya cek fisik itu lebih sering supaya cepat tahu kalau ada selisih data."

Kondisi ini memperlihatkan bahwa frekuensi verifikasi yang rendah dapat memperbesar risiko ketidaksesuaian data administrasi dengan keadaan fisik aset, terutama pada barang-barang yang mobilitasnya tinggi di lingkungan kantor.

Dari sisi teknologi, kendala aplikasi SIMAN V2 dan jaringan internet juga memengaruhi kualitas penatausahaan. Aplikasi yang tidak selalu stabil menyebabkan operator harus melakukan pengecekan ulang setelah input data. Bapak Bambang menyatakan, Aplikasi sangat membantu, tapi kalau jaringan internet sedang tidak stabil, sinkronisasi modulnya lambat dan bisa bikin salah input. Selain itu, proses pemindaian barcode menggunakan ponsel juga dianggap kurang efisien. Ia menambahkan bahwa scan barcode pakai HP itu lama kalau kameranya kurang bagus atau aplikasinya error, jadi kadang harus ulang beberapa kali. Hambatan teknis ini menunjukkan perlunya peningkatan infrastruktur pendukung agar sistem pencatatan BMN dapat berjalan lebih akurat dan efisien.

Pengawasan terhadap pengelolaan BMN di BPK Perwakilan Provinsi Bali dilaksanakan melalui monitoring dan evaluasi (*monev)* yang dilakukan setiap semester. Kegiatan ini menghasilkan laporan yang memuat temuan ketidaksesuaian data, serta rekomendasi koreksi yang harus ditindaklanjuti. Dalam wawancara, Bapak Bambang menegaskan, setiap semester selalu ada monev, dan temuan-temuannya kami tindaklanjuti supaya data bisa lebih akurat. Struktur pengawasan yang berjalan baik ini menunjukkan bahwa aspek birokrasi dalam implementasi kebijakan telah berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan umpan balik rutin untuk meningkatkan ketertiban administrasi sekaligus kondisi fisik aset.

Komitmen pelaksana menjadi faktor pendukung keberhasilan pengelolaan BMN. Operator BMN menunjukkan sikap proaktif dalam menelusuri aset yang bermasalah dan menyelesaikan ketidaksesuaian pencatatan. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Bambang yang

menyatakan, kalau ada data yang tidak cocok, kami langsung telusuri sampai ketemu supaya tidak jadi masalah di laporan. Sikap ini mencerminkan dimensi disposisi dalam model Edward III, di mana motivasi dan tanggung jawab pelaksana menjadi faktor penentu efektivitas implementasi kebijakan. Komitmen operator juga terbukti dari ketepatan penyampaian laporan semesteran serta upaya mereka dalam meminimalkan risiko kesalahan pencatatan meskipun menghadapi berbagai kendala teknis dan administratif.

Tabel 1. Temuan Utama Penelitian Pengelolaan BMN di BPK Perwakilan Provinsi Bali

Aspek Temuan	Deskripsi Temuan	Kutipan Wawancara
Pencatatan dan Pendataan	Prosedur pencatatan berjalan sesuai regulasi, meliputi SAKTI, DBR, dan distribusi aset.	"Setiap barang yang datang pasti kami catat dulu… lalu dicatat di DBR."
Sumber Daya Manusia	Operator memiliki beban kerja ganda sehingga tidak fokus pada penatausahaan.	"Kadang kami harus urus BMN sambil tangani pekerjaan lain…"
Komunikasi dan Klasifikasi Barang	Perbedaan istilah seperti "lemari kayu" dan "buffet" menyebabkan ketidaksesuaian data.	"Saya menyebutnya lemari kayu, tapi operator lain menulis buffet…"
Inventarisasi Fisik	Frekuensi inventarisasi fisik lima tahunan dinilai tidak memadai.	"Idealnya cek fisik itu lebih sering supaya cepat tahu kalau ada selisih data."
Kendala Teknologi	Jaringan internet tidak stabil dan scan barcode kurang efisien.	"Kalau jaringan tidak stabil, sinkronisasi lambat… Scan barcode pakai HP itu lama."
Pengawasan (*Monev*)	Monev dilakukan setiap semester dan memberi umpan balik bagi operator.	"Setiap semester selalu ada monev, dan temuan-temuannya kami tindaklanjuti."
Komitmen Pelaksana	Operator proaktif dalam menyelesaikan selisih data.	"Kalau ada data yang tidak cocok, kami langsung telusuri sampai ketemu."

Dari tabel 1 di atas menunjukkan bahwa pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di BPK Perwakilan Provinsi Bali telah berjalan sesuai regulasi, terutama dalam aspek pencatatan melalui SAKTI, DBR, dan mekanisme distribusi aset. Namun, efektivitas penatausahaan masih terhambat oleh beberapa faktor, seperti beban kerja ganda operator yang mengurangi fokus pada pembaruan data, lemahnya komunikasi internal terkait klasifikasi barang yang menyebabkan ketidaksesuaian istilah antaroperator, serta rendahnya frekuensi inventarisasi fisik yang membuat selisih data sulit terdeteksi secara cepat (I. W. D. D. Setyawan et al., 2025). Selain itu, kendala teknis seperti jaringan internet tidak stabil dan proses pemindaian barcode yang lambat turut menghambat akurasi pendataan. Meski demikian, adanya

monitoring dan evaluasi (monev) setiap semester serta komitmen pelaksana yang proaktif dalam menelusuri selisih data menunjukkan bahwa upaya perbaikan terus dilakukan secara berkelanjutan.

PEMBAHASAN

Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) pada BPK Perwakilan Provinsi Bali menunjukkan bahwa tata kelola aset memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas kinerja organisasi. Sebagaimana dijelaskan (Yudhistira, 2024), BMN merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan memerlukan sistem pencatatan yang akurat. Proses penatausahaan yang dilakukan BPK Bali telah mengikuti ketentuan regulasi pemerintah mulai dari perolehan hingga penghapusan. Pencatatan awal melalui aplikasi SAKTI menjadi dasar akurasi data sebelum dilakukan verifikasi fisik maupun distribusi. Setiap aset kemudian dicatat dalam Daftar Barang Ruangan (DBR) sebagai bentuk kontrol internal yang memastikan keberadaan barang dapat dilacak dengan baik. Hal ini sejalan dengan PP No. 18 Tahun 2020 yang mengatur seluruh mekanisme siklus pengelolaan aset negara. Pengelolaan fisik juga dilakukan melalui pemeliharaan, perbaikan, dan penghapusan barang yang rusak berat agar tidak menimbulkan beban keuangan negara. Praktik ini menunjukkan bahwa secara struktural, mekanisme pengelolaan telah sesuai pedoman pemerintah (Jazuli et al., 2023). Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa aspek administratif tersebut masih menghadapi sejumlah kendala yang berpengaruh terhadap keakuratan data.

Hasil wawancara dengan petugas BMN, Bambang Triardana, mengungkap bahwa pengelolaan aset di BPK Bali dijalankan oleh beberapa pihak dengan pembagian tugas yang jelas. Operator SIMAN V2 dan SAKTI menangani pencatatan administrasi, sedangkan PPK dan Kepala Satker berperan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengadaan dan penghapusan. Selain itu, panitia inventarisasi turut berperan melakukan verifikasi fisik aset secara berkala. Namun, kendala muncul dari keterbatasan jumlah personel yang menyebabkan beban kerja operator menjadi berlebih. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sakinah, 2025) yang menyatakan bahwa kurangnya sumber daya manusia dapat menurunkan efektivitas pencatatan dan pengawasan aset. Beban kerja yang tinggi dapat mengakibatkan keterlambatan input data dan meningkatkan risiko human error. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sumber daya dalam model implementasi Edward III belum

optimal. Dengan demikian, kecukupan personel menjadi salah satu faktor krusial yang memengaruhi ketertiban administrasi dalam pengelolaan BMN.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah ketidaksesuaian antara data administrasi dan kondisi fisik aset di lapangan. Perbedaan persepsi operator dalam penyebutan jenis barang seperti "lemari kayu", "buffet", atau "rak" menyebabkan ketidakkonsistenan pencatatan pada SIMAN V2. Bambang Triardana menyatakan bahwa tidak adanya peralihan informasi yang jelas antaroperator menyebabkan kebingungan dalam penelusuran aset. Hal ini menunjukkan lemahnya aspek komunikasi dalam model implementasi kebijakan Edward III. Temuan (Sulila, 2024) dan (Lubis, 2023) menunjukkan bahwa ketidaksinkronan pengetahuan antar pelaksana dapat menimbulkan kerancuan data dan menghambat efektivitas administrasi aset. Ketidakkonsistenan tersebut juga memperlambat proses verifikasi fisik karena operator harus mencocokkan kembali data berdasarkan karakteristik barang. Situasi ini semakin kompleks setelah adanya migrasi SIMAN berbasis desktop ke SIMAN V2 berbasis web yang mengubah sistem penomoran aset. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perubahan sistem membutuhkan komunikasi internal yang lebih kuat agar kesalahan pencatatan dapat diminimalisasi.

Migrasi ke SIMAN V2 juga membawa tantangan teknis dalam proses pencatatan aset. Perubahan penomoran aset mengharuskan seluruh BMN diberi penomoran ulang dan barcode baru, sehingga memerlukan pekerjaan tambahan bagi operator. Proses scanning barcode menggunakan perangkat seluler sering kali terkendala kualitas kamera dan kestabilan aplikasi. Bambang Triardana dalam wawancaranya memperluat penelitian (Damayanti, 2021) yang menyebutkan bahwa jaringan internet yang tidak stabil menyebabkan proses sinkronisasi data menjadi lambat. Kondisi ini memperbesar risiko kesalahan input karena operator harus memastikan bahwa setiap data telah tersimpan dengan benar. Hambatan teknis ini menunjukkan bahwa aspek sumber daya sarana dalam model Edward III masih belum maksimal. Penelitian (Halim, 2020) juga menekankan perlunya peningkatan kualitas sistem informasi serta pelatihan pengelola BMN untuk meminimalkan kendala teknis. Dengan demikian, keberhasilan SIMAN V2 sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur dan kemampuan pengguna dalam mengoperasikan sistem secara efektif.

Untuk mengatasi ketidaksesuaian data administrasi, operator melakukan verifikasi berkala terhadap kode barang, lokasi, dan kondisi fisik aset. Namun, frekuensi inventarisasi yang hanya dilakukan lima tahun sekali dinilai tidak cukup untuk mengimbangi perubahan

aset yang dinamis. Inventarisasi fisik yang jarang dilakukan memperbesar kemungkinan terjadinya selisih antara data administrasi dan data lapangan. Kondisi ini menyebabkan operator harus melakukan pengecekan manual setiap kali terjadi perpindahan atau perubahan kondisi barang. Hal tersebut menambah beban kerja dan memakan waktu dalam proses penyesuaian data. Praktik ini sejalan dengan rekomendasi (Fadirah et al., 2025) dan (Firda et al., 2021)yang menekankan pentingnya validasi data secara rutin untuk menjaga keakuratan informasi aset. Frekuensi verifikasi yang lebih tinggi akan memberikan kepastian bahwa data yang tercatat dalam SIMAN V2 selalu mutakhir. Oleh karena itu, peningkatan intensitas inventarisasi menjadi solusi penting dalam menjaga ketertiban administrasi BMN.

Pengawasan internal melalui monitoring dan evaluasi (monev) menjadi salah satu mekanisme penting dalam menjaga akurasi data BMN di BPK Bali. Kegiatan monev dilakukan setiap semester dan menghasilkan laporan pengendalian yang menjadi dasar perbaikan pengelolaan aset. Kehadiran sistem monev ini mencerminkan bahwa aspek struktur birokrasi, sebagaimana diuraikan dalam model Edward III, telah diterapkan secara efektif. Temuan (Listiyaningsih et al., 2025) dan (Hasibuan, 2023) menunjukkan bahwa monev yang menghasilkan umpan balik konkret memberikan kontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola aset. Laporan monev juga berfungsi sebagai alat kontrol yang dapat mengidentifikasi ketidaksesuaian data lebih awal. Hal ini membantu operator memperbaiki pencatatan sebelum pemeriksaan eksternal dilakukan. Dengan demikian, pengawasan internal yang kuat berperan penting dalam meningkatkan tertib administrasi dan akurasi data BMN. Keberadaan monev yang rutin menjadi salah satu keunggulan BPK Bali dalam menjalankan fungsi pengelolaan aset secara akuntabel.

Dari aspek disposisi atau sikap pelaksana, operator BMN BPK Bali menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya. Hal ini terlihat dari ketepatan waktu penyampaian laporan semester serta inisiatif untuk menelusuri permasalahan data hingga tuntas. Komitmen ini mencerminkan sikap pelaksana yang selaras dengan model Edward III yang menekankan pentingnya kemauan dan motivasi pelaksana dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Temuan (Handayani, 2023) dan (Nurma Sari, 2024) juga memperkuat bahwa komitmen pelaksana dapat meningkatkan efektivitas implementasi di tingkat operasional. Meskipun menghadapi hambatan teknis maupun administratif, operator tetap berupaya menjaga akurasi data administrasi SIMAN V2. Sikap proaktif ini menunjukkan bahwa faktor disposisi menjadi kekuatan utama dalam menjaga kualitas penatausahaan BMN. Dengan dukungan disposisi yang kuat dan peningkatan sarana serta

komunikasi internal, implementasi pengelolaan BMN dapat berjalan lebih optimal. Maka dari itu, peran komitmen pelaksana sangat penting dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang tertib, akuntabel, dan efektif.

Sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III dalam (D. Setyawan & Srihardjono, 2016) tentang implementasi kebijakan memerlukan dukungan sumber daya yang memadai dan komunikasi yang efektif, karena komitmen saja belum cukup. Berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu: 1) Untuk mempercepat dan meningkatkan akurasi proses pendataan BMN, disarankan agar jumlah operator BMN ditambah. Dengan penambahan ini, beban kerja operator dapat terbagi secara optimal, sehingga mereka dapat fokus dalam penginputan data dan verifikasi fisik barang tanpa terganggu oleh pekerjaan lain yang bersifat administratif atau non-BMN. Hal ini akan meningkatkan kecepatan pembaruan data dan meminimalkan kesalahan input yang selama ini menjadi tantangan dalam tata kelola BMN. 2) Selain itu, peningkatan kapasitas operator melalui pelatihan internal dan sosialisasi rutin sangat diperlukan untuk menyelaraskan pemahaman teknis yang berkaitan dengan pencatatan, klasifikasi, dan pengelolaan aplikasi seperti SAKTI dan SIMAN V2. Pelatihan ini dapat dilakukan secara interaktif agar operator tidak hanya memahami prosedur administrasi, tetapi juga mampu mengantisipasi dan memecahkan masalah yang muncul selama pelaksanaan tugas. Sosialisasi juga penting untuk memastikan seluruh pihak memahami standar pelaporan dan kewajiban pelaporan perubahan kondisi aset secara konsisten. 3) Untuk mengatasi minimnya intensitas inventarisasi fisik yang hanya dilakukan lima tahun sekali dan ketidaksesuaian data administrasi dengan kondisi riil aset, BPK Perwakilan Provinsi Bali dapat lebih meningkatkan frekuensi verifikasi fisik menjadi minimal setiap semester atau triwulan, sejalan dengan dinamika perubahan aset seperti perpindahan, pemeliharaan, dan penghapusan. 4) Integrasi teknologi digital seperti penerapan SIMAN V2 secara penuh dapat dilakukan dengan melengkapi perangkat scanner barcode khusus dan memperbaiki infrastruktur jaringan internet stabil untuk sinkronisasi data real time antar modul SAKTI dan SIMAN V2, sehingga mengurangi ketergantungan pada ponsel pribadi yang sering error dan meminimalkan human errror akibat proses manual yang lambat. Hal ini tidak hanya mempercepat pencocokan data fisik dengan administrasi, tetapi juga mendukung transparansi dan akuntabilitas. 5) Adanya perbedaan persepsi antar operator mengenai klasifikasi barang seperti "lemari kayu", "buffet", atau "rak" serta minimnya dokumentasi peralihan, BPK Perwakilan Provinsi Bali perlu menyusun Standard Operating Procedure (SOP) klasifikasi aset yang seragam berdasarkan pedoman nasional, bisa juga

dengan dilengkapi glosarium istilah baku dan pelatihan simulasi pencatatan untuk memastikan konsistensi pemahaman di seluruh tingkat unit kerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa secara prosedural implementasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di BPK Perwakilan Provinsi Bali telah mengikuti ketentuan yang berlaku, mulai dari pencatatan awal, pendistribusian, penyusunan DBR, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara rutin. Namun, efektivitas penatausahaan belum sepenuhnya optimal karena masih ditemui berbagai kendala pada aspek komunikasi dan sumber daya sebagaimana dijelaskan dalam model implementasi kebijakan Edward III. Ketidaksamaan pemahaman antaroperator mengenai klasifikasi aset, minimnya sosialisasi internal, terbatasnya dokumentasi antarperalihan operator, serta kurangnya jumlah personel menyebabkan proses pembaruan data berjalan lebih lama dan meningkatkan potensi kesalahan pencatatan. Di sisi lain, kendala teknis seperti jaringan internet yang tidak stabil dan keterbatasan perangkat pemindaian *barcode* turut menghambat verifikasi fisik dan akurasi penomoran aset pada SIMAN V2. Meskipun demikian, komitmen pelaksana dalam melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas administrasi aset, sehingga penguatan komunikasi dan koordinasi antarunit, peningkatan kapasitas SDM, penambahan operator, serta pembaruan infrastruktur teknologi informasi menjadi langkah strategis menuju pengelolaan BMN yang responsif, akurat, dan sejalan dengan prinsip *good governance*.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian mengenai implementasi pengelolaan BMN pada instansi pemerintah dengan menunjukkan secara empiris bahwa kendala komunikasi, sumber daya manusia, dan aspek teknis masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan penatausahaan aset yang akurat dan akuntabel. Temuan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi masalah pada tataran operasional, seperti ketidaksesuaian data administrasi, kurangnya konsistensi klasifikasi aset, dan keterbatasan personel, tetapi juga menggambarkan secara konkret bagaimana faktor-faktor tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas kinerja unit pengelola BMN. Secara teoretis, penelitian ini turut memperkuat dan memvalidasi teori implementasi kebijakan Edward III dalam konteks pengelolaan aset negara. Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini memberikan dasar bagi pengembangan strategi perbaikan melalui peningkatan kapasitas

SDM, optimalisasi komunikasi antarunit, serta penguatan infrastruktur teknologi informasi, sehingga dapat menjadi rujukan bagi instansi pemerintah lain dalam mengevaluasi dan menyempurnakan sistem pengelolaan BMN agar lebih transparan, tertib administrasi, dan sesuai prinsip *good governance*.

Rekomendasi bagi penelitian selanjutnya adalah: (1) memperluas cakupan analisis dengan membandingkan implementasi pengelolaan BMN pada beberapa satuan kerja atau instansi pemerintah lain sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penatausahaan aset dalam berbagai konteks organisasi; (2) menggunakan pendekatan *mixed methods* agar temuan kualitatif mengenai kendala komunikasi, sumber daya, dan teknis dapat diperkuat dengan data kuantitatif terkait tingkat akurasi pencatatan, frekuensi ketidaksesuaian data, maupun beban kerja operator BMN; dan (3) mengkaji lebih jauh efektivitas aplikasi SIMAN V2 dan SAKTI melalui evaluasi *user experience*, uji efisiensi operasional, serta eksplorasi potensi integrasi teknologi baru seperti *auto-tracking* dan *digital inventory*. Dengan pendekatan tersebut, penelitian lanjutan diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi teknis dan kebijakan yang lebih aplikatif untuk meningkatkan kualitas pengelolaan BMN secara nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Syakir Media Press.

Damayanti, E. (2021). Penggunaan Media Big Book untuk Menumbuhkan Minat Baca Siswa di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu, 4*(1), 1147. https://jurnal.uns.ac.id/SHES/article/view/70571

Fadirah, A. N., Utaminingtyas, T. H., & Khairunnisa, H. (2025). Analisis Pengendalian Internal dalam Perencanaan Kebutuhan Aset Barang Milik Negara oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, 6*(1), 159–169. https://doi.org/10.21009/japa.0601.12

Utami, F. C., Maryani, D., & Muhi, A. H. (2021). Collaborative Governance dalam Pengembangan Usaha Minyak Kayu Putih di Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *VISIONER: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia, 13*(2), 221–232. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.428

Halim, T. D. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal, 4*(4).

Handayani, T. A. (2023). Dimensi Disposisi atau Sikap Pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Sistem Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi) dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Media Bina Ilmiah, 18*(4), 49–68. https://doi.org/10.33758/mbi.v18i4.493

Hartanto, N. (2018). Implementasi PP No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Barang dan

Jasa. *Journal of Management Review, 2*(3), 223–237. https://jurnal.unigal.ac.id/managementreview/article/view/1799

Hasibuan, N. F. A. (2023). Optimalisasi Pengelolaan BMN dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan pada UIN Sumatera Utara Medan. *Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi, 3*(3), 218–231. https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i03.379

Jazuli, A., Salsabila, A. Y., Assidiqi, A. H., & Sadiyah, D. (2023). The strategy of the head of Madrasah in cultivating fastabiqul khoirot culture in the state high school environment in Batu City. *EDHJ Unnusa, 8*(April), 56–65. https://journal2.unusa.ac.id/index.php/EHDJ/article/view/4849

Listiyaningsih, L., Ismail, I., & Iryani, D. (2025). Konsep Pengawasan Tata Kelola Barang Milik Negara di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja untuk Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Global Ilmiah, 2*(4), 16–29. https://doi.org/10.55324/jgi.v2i4.180

Lubis, E. A. (2023). Efektivitas Kelola Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana, 1*(3), 49–65. https://doi.org/10.61860/jigp.v1i3.50

Majid, W. S. (2025). Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Negara terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. *Jurnal Wawasan Dan Riset Akuntansi, 6*(2), 120–131. https://doi.org/10.25157/jwr.v6i2.1907

Miles, M. B., Huberman, A. M., & J. S. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (H. Salmon, Ed.). SAGE Publications.

Nurma Sari, I. T. (2024). Pengelolaan Aset Negara yang Terintegrasi melalui SIMAN V2. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-singkawang/baca-artikel/17206/Pengelolaan-Aset-Negara-Yang-Terintegrasi-Melalui-SIMAN-V2.html

Sakinah, A. R. (2025). Penatausahaan Barang Milik Negara di Balai Wilayah Sungai Sulawesi III Palu. *JPS: Journal of Publicness Studies, 2*(3), 89–98. https://jurnal.fisip.untad.ac.id/index.php/jps/id/article/view/2225

Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa dengan Model Edward III di Desa Landungsari Kabupaten Malang. *Reformasi, 6*(2), 312–329. https://doi.org/10.33366/rfr.v6i2.689

Setyawan, I. W. D. D., Prayana, I. K. R., & Wetarani, N. P. K. (2025). Efektivitas Pelayanan dalam Penerbitan Kartu Keluarga melalui Taring Dukcapil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar. *Socio-Political Communication and Policy Review, 2*(5), 1–10. https://doi.org/10.61292/shkr.288

Sulila, V. V. (2024). Efektivitas Pengelolaan Barang Milik Negara (Studi Kasus Bappedalitbang Kabupaten Bone Bolango). *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran, 12*(1), 23–35. https://doi.org/10.37531/ecotal.v4i2.804

Wicaksana, S. W., & Nugroho, M. (2025). Studi Kasus Manajemen Aset Barang Milik Negara di Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. *Journal of Social and Economics Research, 7*(2), 293–305. https://doi.org/10.54783/jser.v7i2.1087

Yudhistira, B. S. (2024). Pengaruh Asset Life Cycle Management terhadap Performa Aset Negara. *Jurnal Kebijakan Ekonomi, 9*(1), 24–39. https://doi.org/10.7454/jke.v19i1.1148